



25

29

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
JL. Madukoro Raya no 7,
Krobokan, Semarang Barat, 50141

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	6
2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....	23
2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya	36
2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....	45
BAB III	47
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
Tujuan dan Sasaran.....	47
Strategi dan Kebijakan	49
3.2.1. Strategi	49
3.2.2. Kebijakan	50
BAB IV.....	51
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	136
BAB V.....	139
PENUTUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 202521

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.....21

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.....22

Tabel 2.4
Sebaran Pegawai Berdasarkan Unit Kerja/Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.....22

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 202522

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPU Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2020 – 2024.....24

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang28

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang34

Tabel 2.9
Indikasi Program Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2025-2029....44

Tabel 2.10
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....45

Tabel 2.11
Isu Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-202946

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....48

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-202949

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-202950

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD52

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-202970

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang73

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang
Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang137

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula dalam pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat pada masa lalu sehingga dapat diantisipasi dan ditingkatkan pada masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban kinerja publik. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, menjadi dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk menyusun dokumen RENSTRA yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang. Atas dasar tersebut, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya di bidang pekerjaan umum, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama periode 2021–2026, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah mencapai berbagai kemajuan, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan kota, rehabilitasi dan pembangunan jembatan, penguatan sistem drainase untuk mengurangi genangan, serta penataan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah. Capaian ini berdampak pada kelancaran mobilitas, konektivitas antarwilayah, peningkatan akses layanan publik, serta memperkuat ketahanan kota menghadapi tantangan perubahan iklim.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan infrastruktur masih signifikan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, serta fenomena banjir, genangan, dan penurunan muka tanah memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program serta pendayagunaan aparatur, dan agar mampu eksis serta unggul dalam

lingkungan yang berubah dengan cepat dewasa ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai organisasi harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang periode 2025–2029.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 94);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, baik di tingkat bidang, sekretariat, maupun UPTD, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, serta Bidang Pendayagunaan Infrastruktur.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan yang mencakup peninjauan kinerja periode sebelumnya, pemetaan tugas dan fungsi ke dalam struktur kinerja (cascading), serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi. Hasil tahapan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan yang terarah dan selaras dengan visi pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, khususnya pada bidang pekerjaan umum;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
4. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dalam kurun waktu lima tahun; dan
5. Memberikan gambaran umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada periode sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan, permasalahan, dan isu strategis untuk lima tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Semarang periode 2025–2029, terutama dalam menciptakan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Renstra ini menjadi komitmen bersama untuk mengarahkan setiap langkah, memastikan keterpaduan antarprogram, serta menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Selain itu, memuat permasalahan dan isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III	Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, serta lokasi pelaksanaan (lokus). Bab ini juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, termasuk kondisi awal dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
BAB V	Penutup Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, serta Pendayagunaan Infrastruktur;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Wali Kota;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, Pendayagunaan Infrastruktur, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, serta Pendayagunaan Infrastruktur;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Rekayasa Teknis, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase, Pendayagunaan Infrastruktur, dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di seluruh bidang dan UPTD;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

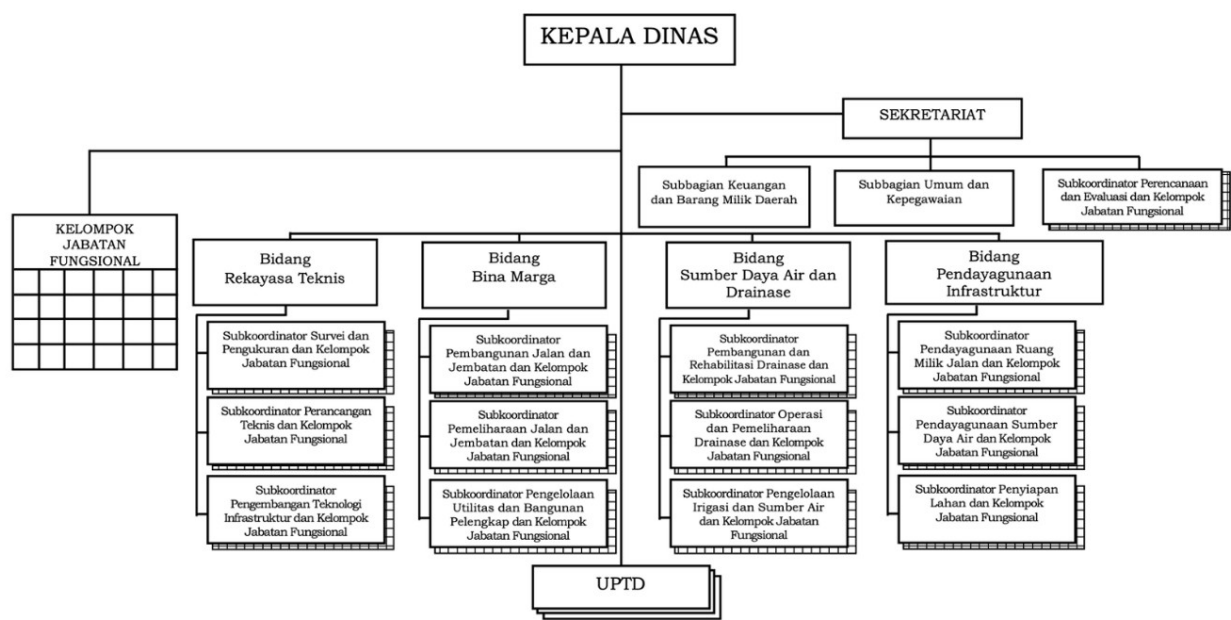
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga mengatur terkait susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Survei dan Pengukuran
 - 2) Subkoordinator Perancangan Teknis; dan
 - 3) Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

- 3) Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
 - 2) Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase; dan
 - 3) Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.
- f. Bidang Pendayagunaan Infrastruktur, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
 - 2) Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Subkoordinator Penyiapan Lahan.
- g. UPTD, dan
- h. Jabatan Fungsional

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021

- b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

 - a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki tugas : merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

b) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD. Selain itu, sekretariat memiliki tugas tambahan sebagai koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Dinas;
7. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
8. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
9. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
12. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
14. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
15. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
17. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
18. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

19. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
20. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
21. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
22. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
23. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
24. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
25. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
26. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
7. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
9. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
11. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
12. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
5. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
6. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
8. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
9. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
10. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
11. menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
14. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
15. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
5. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional

Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;

6. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
7. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Bidang Rekayasa Teknis

Bidang Rekayasa Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Survei dan Pengukuran, Seksi Perancangan Teknis, dan Seksi Pengembangan Teknologi Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rekayasa Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rekayasa Teknis;
5. pelaksanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan bina marga, sumber daya air dan drainase;
6. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data teknis bina marga, sumber daya air dan drainase;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis bina marga, sumber daya air, drainase dan sarana pendukungnya;
8. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan evaluasi dan justifikasi teknis;
9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
10. pelaksanaan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
12. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;

13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rekayasa Teknis;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Rekayasa Teknis;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rekayasa Teknis terdiri atas Subkoordinator Survei dan Pengukuran, Subkoordinator Perancangan Teknis, dan Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur.

Subkoordinator Survei dan Pengukuran mempunyai tugas :

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Survei dan Pengukuran;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Survei dan Pengukuran;
5. menyiapkan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan bina marga, sumber daya air dan drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan data teknis bina marga, sumber daya air dan drainase;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Survei dan Pengukuran;
8. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Survei dan Pengukuran;
9. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Survei dan Pengukuran;
10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Perancangan Teknis mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perancangan Teknis;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perancangan Teknis;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis bina marga, sumber daya air, drainase dan sarana pendukungnya;
6. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan evaluasi dan justifikasi teknis;
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perancangan Teknis;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perancangan Teknis;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perancangan Teknis;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
5. menyiapkan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
6. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
7. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas teknologi infrastruktur dan teknologi informasi;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Infrastruktur;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Bina Marga;
5. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
6. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan peningkatan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya;
8. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
9. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penilikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
10. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
11. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
12. pelaksanaan kegiatan pengaturan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
13. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Bina Marga;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Bina Marga;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri atas Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan, Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
6. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peningkatan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembangunan Jalan dan Jembatan;

10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
6. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penilikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
6. menyiapkan kegiatan pengaturan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;

9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase, dan Seksi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
5. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase;
6. pelaksanaan kegiatan pengaturan sistem drainase;
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem drainase;
8. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat sarana dan prasarana drainase;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasi drainase;
10. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan sumber air antara lain bendung, embung, kolam retensi, polder, sumur air baku dan bangunan pengawetan air tanah;
11. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
12. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan irigasi dan sumber air;
13. pelaksanaan kegiatan pengamanan aset jaringan irigasi primer dan sekunder;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase terdiri atas Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase, Subkoordinator Operasi dan

Pemeliharaan Drainase; serta Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air.

Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengaturan sistem drainase;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem drainase;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
5. menyiapkan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat sarana dan prasarana drainase;
6. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasi drainase;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
8. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
9. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelola Irigasi dan Sumber Air;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
5. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan Irigasi dan Sumber Air antara lain bendung, embung, kolam retensi, polder, sumur air baku dan bangunan pengawetan air tanah;
6. menyiapkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
7. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian jaringan irigasi dan sumber air;
8. menyiapkan kegiatan pengamanan aset jaringan irigasi primer dan sekunder;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f) Bidang Pendayagunaan Infrastruktur

Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Seksi Penyiapan Lahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur mempunyai fungsi:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
7. pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang milik jalan;
8. pelaksanaan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
10. pelaksanaan kegiatan pengamanan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;

11. pelaksanaan kegiatan perencanaan, persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penyiapan lahan;
12. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pencatatan aset lahan;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan guna pemanfaatan lahan;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
15. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendayagunaan Infrastruktur terdiri atas Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air; serta Subkoordinator Penyiapan Lahan.

Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
8. menyiapkan kegiatan pengamanan ruang milik jalan;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;\
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendayagunaan Sumber Daya Air;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;

6. menyiapkan kegiatan penyusunan, penataan, dan kerja sama di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
7. menyiapkan kegiatan pengamanan di bidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendayagunaan Sumber Daya Air;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Penyiapan Lahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyiapan Lahan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Penyiapan Lahan;
5. menyiapkan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian penyiapan lahan;
6. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pencatatan aset lahan;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan guna pemanfaatan lahan;
8. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Penyiapan Lahan;
9. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Penyiapan Lahan;
10. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyiapan Lahan;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki menjadi faktor penentu dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, khususnya di bidang rekayasa teknis, bina marga, sumber daya air dan drainase, serta pendayagunaan infrastruktur.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	PNS	105	17,26
2	PPPK	357	58,71
3	Non-ASN	146	24,03
	Total	608	100%

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	6	0	6
1	SMP Sederajat	1	0	19	0	20
2	SMA Sederajat	16	1	165	14	196
3	D3	9	6	10	8	33
4	D4	1	0	0	0	1
4	S1	46	15	100	35	196
5	S2	9	1	0	0	10
6	S3	0	0	0	0	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 462 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	16	6	22
2	Golongan III	61	17	78
3	Golongan IV	5	0	5

Tabel 2.4.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Unit Kerja/Bidang
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Unit Kerja/Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sekretariat	39	7.93
2	Bidang Rekayasa Teknis	23	4.68
3	Bidang Bina Marga	24	4.88
4	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	64	13.01
5	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur	24	4.88
6	UPTD	283	57.62
	Total	491	100

b. Sarana Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, meliputi gedung kantor, gudang, peralatan kerja, kendaraan dinas, dan perangkat teknologi informasi:

Tabel 2.5.
Daftar Sarana dan Prasarana
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/Sedang/Rusak Ringan/Rusak Berat)	Keterangan
1	Gedung Kantor	110	Baik	
2	Kendaraan Dinas	197	Baik	
3	Alat Berat (Excavator, Loader, dsb.)	134	Baik	
4	Perangkat Komputer	435	Baik	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum, yang meliputi rekayasa teknis, bina marga, sumber daya air dan drainase, serta pendayagunaan infrastruktur. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra sebelumnya dan selaras dengan indikator kinerja daerah (IKD) di RPJMD Kota Semarang.⁴

a. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPU Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	INDIKATOR KINERJA DAERAH																		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	Persen	-	-	NA	93,74	95,61	96,17	96,78	NA	94,60	96,52	96,57	96,57	NA	100,92	100,95	100,42	99,78
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	Persen	-	-	NA	97,25	98,64	99,17	99,41	NA	97,25	97,25	97,25	97,25	NA	100,00	98,59	98,06	97,83
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Persen	-	-	NA	80,64	81,80	83,00	84,20	NA	80,64	81,80	83,00	84,20	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	-	-	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004 % (781,141 km)	93,273 % (783,404 km)	98,28	99,87	99,48	99,47	99,22
	Persentase luas sawah beririgasi (%)	Persen	-	-	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	65,43	100,00	100,00	100,00	100,00	152,16

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	Persen	-	-	NA	82,5	82,5	82,5	82,5	80	82,5	82,5	82,5	82,5	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	Persen	-	-	3,73	3,40	3,50	3,32	3,19	1,30 (Hanya jalan dan permukiman)	2,7 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,74 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,715	1,645	286,92	125,93	201,15	193,59	193,92
	Persentase kawasan banjir (%)	Persen	-	-	3,73	3,40	3,02	2,64	2,26	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23	100,00	100,00	127,43	112,82	101,35
	Persentase kawasan rob (%)	Persen	-	-	2,00	2,00	1,85	1,65	1,45	2	2	1,11	1,09	1,06	100,00	100,00	166,67	151,38	136,79
	Indikator kinerja Utama (IKU)																		
	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	-	-	NA	NA	53	68	73	NA	NA	53,98	69,13	73,70	NA	NA	101,85	101,66	100,96
	a) Persentase Kawasan banjir	Persen	-	-	3,73	3,40	3,02	2,64	2,26	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23	100,00	100,00	127,43	112,82	101,35
	b) Persentase Kawasan rob	Persen	-	-	2,00	2,00	1,85	1,65	1,45	2	2	1,11	1,09	1,06	100,00	100,00	166,67	151,38	136,79
	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persen	-	-	74,13	74,50	74,90	75,30	75,75	74,13	74,50	89,502	89,72	90,51	100,00	100,00	119,5	119,16	119,49
	a) Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	-	-	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004 % (781,141 km)	93,273 % (783,404 km)	100,41	100,02	100,0	99,75	99,22
	b) Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	-	-	55,75	56,00	56,30	56,60	57,00	55,75	86,45	86,45	86,00	91,90	100,00	153,55	153,55	151,94	161,22

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)
	c) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	NA	NA	75,10	75,40	77,20	NA	NA	74,80	77,05	77,35	NA	NA	100,4	103,01	103,0

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.677.878.800	32.312.416.520	31.740.116.478	38.007.599.944	107.120.035.673	13.801.271.468	29.598.207.344	30.585.407.930	34.827.605.696	77.492.774.877	94,03	91,60	96,36	91,63	72,34	327,32	63,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.189.366	42.000.000	42.000.000	81.395.627		29.103.360	41.722.250	31.887.270	66.098.400		90,41	99,34	75,92	81,21	33,14	26,66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.711.650.566	16.742.491.534	16.959.575.957	18.156.200.000		17.809.320.439	16.095.178.955	16.368.699.174	17.572.563.152		95,18	96,13	96,51	96,79	-1,04	-0,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.423.693.940	1.887.520.444	4.168.243.483	4.441.398.723		1.165.881.325	1.717.999.680	3.855.508.518	3.834.831.657		81,89	91,02	92,49	86,34	186,14	45,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		105.143.045	226.557.410	211.871.839	425.517.479		90.050.400	150.583.100	159.755.217	370.449.812		85,65	66,47	75,40	87,06	41,72	52,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.030.698.840	10.088.933.271	13.418.032.865	14.250.248.617		7.944.984.154	9.875.398.604	11.882.800.374	12.707.702.032		87,98	97,88	88,55	89,18	15,11	17,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.009.040.763	2.734.847.839	3.187.875.800	69.744.175.227		2.558.867.666	2.697.185.091	2.517.474.393	42.925.062.824		85,04	98,62	78,97	61,42	47,88	56,22

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Real isas i
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.749.869 .000	29.073.655 .897	25.834.082. 945	32.352.188 .964	45.885.383.8 76	25.431.2 06.946	25.595.877 .901	23.895.488 .277	26.471.883 .971	40.279.986. 155	98, 76	88, 04	92, 50	81, 82	87, 78	24,7 1	20, 16
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.559.528. 060	23.121.624. 810	28.162.558. 070	41.835.767.2 94		21.313.155. 763	21.227.716. 708	23.255.092 .480	36.550.802. 269		86,7 8	91, 81	82, 57	87, 34	17,9 1	19, 55
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.514.127.8 37	2.712.458.1 35	4.189.630.8 94	4.049.616.58 2		4.282.722.1 38	2.667.771.5 69	3.216.791. 491	3.729.183.8 86		94,8 7	98, 35	76, 77	91, 86	-2,76	- 3,6 2
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.576.754 .000	71.559.936 .169	86.837.138. 645	95.442.631 .101	127.238.911. 850	11.496.2 90.840	61.963.119 .484	77.710.215 .107	81.341.491 .013	108.481.94 4.340	99, 30	86, 59	89, 49	85, 23	85, 26	36,5 7	12, 56
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		71.559.936. 169	86.837.138. 645	42.347.800. 637	127.238.911. 850		61.963.119. 484	77.710.215. 107	34.134.787 .090	108.481.94 4.340		86,5 9	89, 49	80, 60	85, 26	36,5 7	12, 56

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I (2020)	II (2021)	III (2022)	IV (2023)	V (2024)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Real isas i
PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	104.766.98 9.200	249.642.57 1.208	263.377.801 .007	277.594.18 9.984	173.696.933. 678	97.828.0 34.707	148.687.07 2.240	243.130.65 7.915	234.788.81 3.655	162.008.10 8.697	93, 38	59, 56	92, 31	84, 58	93, 27	241, 35	353 ,99
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		249.642.57 1.208	263.377.80 1.007	232.318.21 9.987	173.696.933. 678		148.687.07 2.240	243.130.65 7.915	202.075.27 8.93 5	162.008.10 8.697		59,5 6	92, 31	86, 98	93, 27	- 14,7 4	22, 85

c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan pihak internasional, provinsi, maupun lembaga mitra. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas dukungan teknis, serta mendorong inovasi pengelolaan infrastruktur perkotaan.

Pertama, melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, World Bank, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat ketahanan kota terhadap risiko banjir dan rob. Program ini berbentuk pinjaman luar negeri (loan) melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Lokus pekerjaan yang direncanakan antara lain normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (tahun 2025 senilai Rp 682,3 miliar), Sub- Sistem Tenggang-Sodor (tahun 2025 senilai Rp 333 miliar), Sungai Semarang, Asin, dan Baru (tahun 2027 senilai Rp 80,1 miliar), serta Sungai Silandak (tahun 2027 senilai Rp 213 miliar). Ruang lingkup pekerjaan mencakup normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta pembangunan tampungan air berupa kolam retensi dan embung. Seluruh rangkaian pekerjaan ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir dan rob di kawasan rawan Kota Semarang yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kedua, kerja sama Develop to Build (D2B) dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam program Semarang Urban Flood Resilience Project peserta dari Invest International Public Programmes B.V memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah untuk studi dan perencanaan intervensi pengendalian banjir kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga memperoleh dukungan teknis dan pendanaan melalui skema ini. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang telah mengajukan permohonan kewajiban penyediaan lahan untuk kolam retensi. Lokus pekerjaan fisik direncanakan mencakup Rekondisi Kartini Drain (Rp 218,4 miliar) dan Rehabilitasi Saluran Sabuk Lateral Kanal (Rp 25,2 miliar). Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas rehabilitasi saluran drainase, penguatan sistem aliran, serta optimalisasi sistem pengendalian genangan di wilayah kota yang rentan terhadap hujan intensitas tinggi.

Ketiga, kerja sama Blue Deal Indonesia merupakan bentuk kolaborasi internasional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang aktif dalam program ini, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan air perkotaan, pengendalian banjir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui Blue Deal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memperoleh dukungan dalam bentuk pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk pengelolaan air perkotaan dan drainase. Program ini menjadi ruang strategis bagi Kota Semarang untuk memperkuat peran internasional sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan banjir dan rob.

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam jejaring kerja sama lintas daerah, nasional, dan internasional. Kolaborasi ini

menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan infrastruktur Kota Semarang dalam menghadapi tantangan banjir, rob, drainase, dan keterbatasan sumber daya air.

Lebih lanjut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga berperan dalam mendukung pencapaian program lintas sektor, seperti Kota Layak Anak dan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik yang ramah anak, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di sekitar fasilitas Posyandu, dan penataan lingkungan yang aman dan inklusif. Sinergi dengan perangkat daerah terkait diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi fungsi teknis, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan layanan dasar di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum tidak hanya berfokus pada pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan sosial Kota Semarang. Hal ini menegaskan posisi Dinas Pekerjaan Umum sebagai institusi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan anak-anak.

d. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik serta menjawab tantangan infrastruktur perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah inovasi yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Inovasi ini lahir dari kebutuhan lapangan sekaligus komitmen untuk menghadirkan solusi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertama, inovasi SILAPPU (Sistem Informasi Laboratorium & Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang). Sistem ini dikembangkan sebagai layanan digital yang memudahkan masyarakat maupun pelaku jasa konstruksi dalam mengajukan permohonan pengujian material di UPTD Laboratorium dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Melalui SILAPPU, masyarakat dapat mengajukan pengujian terhadap berbagai jenis material konstruksi seperti aspal, beton, paving, tanah, agregat halus, agregat kasar, dan besi. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, kecepatan pelayanan, serta akuntabilitas hasil pengujian material yang sangat penting untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi di Kota Semarang.

Kedua, inovasi Pipa Resap Horizontal (PRH) sebagai upaya konservasi air tanah sekaligus mitigasi genangan dan banjir di kawasan perkotaan. Teknologi ini memanfaatkan pipa yang dipasang secara horizontal di bawah permukaan tanah untuk memperbesar infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah. Dengan penerapan PRH, limpasan air permukaan dapat ditekan sehingga risiko genangan dan beban saluran drainase berkurang. Selain

itu, teknologi ini mendukung konservasi air tanah dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait air bersih dan sanitasi, kota berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta pemulihan fungsi ekosistem daratan. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan

Umum Kota Semarang mulai mengimplementasikan PRH di 53 titik di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Banjir Kanal Barat dan DAS Kali Semarang. Hasil implementasi ini terbukti mampu mereduksi aliran air permukaan, memperkuat adaptasi kota terhadap intensitas hujan tinggi, serta menjadi bagian dari solusi berbasis alam (nature-based solution) dalam pengelolaan sumber daya air perkotaan.

Kedua inovasi ini menggambarkan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga melakukan transformasi dalam tata kelola layanan publik serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. SILAPPU memperkuat aspek pelayanan publik berbasis digital, sedangkan Pipa Resap Horizontal menghadirkan solusi teknis yang ramah lingkungan untuk pengendalian banjir dan konservasi air. Dengan demikian, inovasi yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berkontribusi nyata dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Dalam lima tahun ke depan, dinamika kebijakan pemerintahan, perkembangan pesat wilayah perkotaan, serta kompleksitas kondisi sosial dan lingkungan akan mempengaruhi arah dan capaian pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi tantangan dan peluang menjadi langkah penting untuk memastikan strategi yang tepat dan berkelanjutan.:

a. Tantangan

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan jangka menengah serta perkembangan kebutuhan masyarakat, tantangan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang meliputi:

- 1) Dampak perubahan iklim meningkatkan frekuensi banjir dan rob yang sulit diprediksi.
- 2) Kebutuhan akan sistem pengelolaan banjir yang lebih canggih untuk mempercepat penanganan
- 3) Pesatnya pertumbuhan Kota Semarang memerlukan kapasitas jalan dan jembatan yang lebih besar, terutama di kawasan strategis.
- 4) Dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air.
- 5) Pentingnya pengembangan akses pedestrian yang ramah difabel, lansia, dan anak-anak untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif.
- 6) Masih adanya kawasan miskin yang kurang terjangkau infrastruktur memadai untuk mendukung pendidikan dan perekonomian lokal.

b. Peluang

Di sisi lain, sejumlah peluang strategis dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut:

- 1) Perkembangan teknologi informatika memberikan peluang untuk mengimplementasikan *smart infrastructure*,
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air mendukung program pembangunan yang lebih terarah.
- 3) Pelebaran jalan dan pembangunan jembatan di kawasan strategis

dapat meningkatkan daya saing Kota Semarang di tingkat regional dan nasional.

- 4) Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur kota menciptakan lingkungan yang lebih terawat dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan tantangan dan peluang ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat merumuskan kebijakan dan program yang responsif, inovatif, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu: “Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rumusan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
	Rekayasa Teknis	- Kurangnya dukungan teknologi modern dan terintegrasi - Keterbatasan kapasitas SDM untuk inovasi	- Keterbatasan data geospasial terkini - Minimnya penggunaan teknologi modern - Integrasi perencanaan dengan kebutuhan wilayah kurang optimal - Keterbatasan standar teknis sesuai kebutuhan daerah - Minim inovasi dalam desain perencanaan

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
			- Keterbatasan sarana dan prasarana - Belum optimalnya kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta
	Bina Marga	- Keterbatasan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap - Kurangnya pengawasan dan pengelolaan utilitas	- Sarana dan prasarana kebinamargaan kurang memadai - Data perencanaan terbatas - Pengawasan konstruksi belum optimal (berpengaruh pada daya tahan jalan) - Minim bangunan pelengkap (saluran, dinding penahan, rambu lalu lintas) - Pengelolaan utilitas jalan sering mengganggu fungsi jalan
	Sumber Daya Air dan Drainase	- Ketidakeimbangan antara kebutuhan dan kapasitas sistem drainase - Keterbatasan pengelolaan dan penyediaan sumber daya air	- Luasnya genangan banjir dan rob akibat kapasitas drainase tidak mencukupi - Sarana dan prasarana drainase kurang memadai - Belum ada sistem pemantauan kinerja drainase yang teratur - Operasi dan pemeliharaan drainase belum optimal (SDM & alat terbatas) - Pelestarian sumber air belum maksimal - Sarana pemenuhan kebutuhan air irigasi masih kurang memadai
	Pendayagunaan Infrastruktur	- Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum - Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air dan ruang	- Pengelolaan ruang milik jalan tumpang tindih dengan infrastruktur lain - Kurangnya <i>street furniture</i> dan kantong parkir untuk pejalan kaki - Peningkatan banjir dan rob akibat belum optimalnya sistem drainase - Pengelolaan air kurang terkoordinasi dengan tata ruang - Keterbatasan lahan fasilitas umum di daerah padat penduduk - Kurangnya koordinasi dalam penyiapan lahan proyek infrastruktur
	Kesekretariatan	- Belum optimalnya penyelenggaraan fungsi kelembagaan	- Kurangnya kesadaran pegawai menerapkan prosedur administrasi yang efisien dan transparan - Minim pelatihan peningkatan kompetensi administratif

No	Bidang	Permasalahan	Akar Permasalahan
			- Rendahnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan barang milik daerah - Pelaporan dan pencatatan keuangan belum optimal sesuai standar - Manajemen kinerja pegawai belum maksimal - Kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap awal pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi pedoman nasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah, termasuk perangkat daerah. Dokumen ini menekankan delapan prioritas nasional (Asta Cita), di mana dua di antaranya memiliki relevansi langsung dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu Prioritas 3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.”

Dalam konteks pembangunan Kota Semarang, prioritas nasional tersebut selaras dengan tantangan yang dihadapi daerah, terutama terkait peningkatan ancaman banjir dan rob, penurunan muka tanah, serta kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan sistem drainase, rumah pompa, kolam retensi, serta rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan merupakan kontribusi nyata Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk mendukung agenda nasional penguatan infrastruktur yang tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Lebih jauh, infrastruktur berkelanjutan yang dibangun oleh Dinas PU berperan dalam mendukung pencapaian sasaran nasional RPJMN 2025–2029, antara lain menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2025–2029 tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan

kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

**“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU,
BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
- Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai 2 (dua) indikator tersebut di atas.

c. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari pencapaian Visi Indonesia Maju dan menjadi fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian PU terumuskan sebagai: *“Terwujudnya Indonesia Maju melalui penyelenggaraan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan”*, di mana Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada efisiensi investasi dan pengentasan kemiskinan.

Dari rangkaian sasaran strategis kementerian ini muncul tiga pilar utama yang sangat relevan dengan ruang lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang:

1. Efisiensi investasi, termasuk penurunan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* di bawah 6 angka.
2. Pengentasan kemiskinan secara signifikan hingga mendekati 0%.
3. Dorongan pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan nasional sekitar 8% pada 2029

Lebih lanjut, Renstra Kementerian PU juga memetakan capaian output sektoral yang mendukung infrastruktur strategis, seperti pembangunan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangunan jalan baru; sejumlah komponen kunci yang secara langsung mendukung ketahanan dan efisiensi pembangunan.

Dalam konteks Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran strategis menyediakan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, menanggapi tantangan lokal seperti banjir/rob, penurunan muka tanah, dan ketahanan pembangunan. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PU mendukung hal ini melalui:

- Penekanan pada infrastruktur berkelanjutan, yang memperkuat peran DPU dalam membangun sistem drainase, pompa, dan kolam retensi sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Fokus efisiensi investasi yang relevan bagi program rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur kota, agar komponen teknis dan anggaran dapat digunakan secara optimal.
- Kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan lokal melalui infrastruktur publik—seperti akses air, pengendalian banjir, dan konektivitas jalan—yang mendukung aktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga.

d. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, maka tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas jalan provinsi serta meningkatkan kualitas pelayanan keciptakaryaan. Sasaran yang ditetapkan meliputi bertambahnya panjang jalan provinsi yang sesuai standar, terjaganya kondisi jalan mantap, meningkatnya akses air minum dan sanitasi aman, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.

Program strategis yang dijalankan antara lain pelebaran dan rehabilitasi jalan, pemeliharaan jembatan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional, serta fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung daerah. Kebijakan lain juga diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan penyesuaian harga satuan pekerjaan konstruksi. Seluruhnya ditujukan untuk memperkuat konektivitas, kualitas layanan dasar, dan mutu infrastruktur di Jawa Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pelayanan sumber daya air dan penataan ruang, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai mencakup meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air, keterwujudan penataan ruang, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta kualitas pengelolaan risiko kelembagaan.

Program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah antara lain pengelolaan sungai, bendungan, embung, dan jaringan irigasi; pembangunan bangunan pengendali banjir, pengaman pantai, dan normalisasi sungai; serta kebijakan penataan ruang melalui evaluasi RTRW kabupaten/kota dan penguatan data geospasial. Program ini penting untuk mengurangi risiko daya rusak air, menjamin ketersediaan air baku, serta memastikan pemanfaatan ruang yang selaras dengan daya dukung lingkungan.

Telaahan terhadap kedua Renstra dinas provinsi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Peningkatan kualitas jalan provinsi dan

pemeliharaannya berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Semarang, yang menjadi simpul utama transportasi Jawa Tengah. Program air minum dan sanitasi yang dikembangkan di tingkat provinsi juga memperkuat upaya kota dalam meningkatkan layanan dasar masyarakat.

Di sisi lain, program pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang di tingkat provinsi memiliki dampak strategis bagi Kota Semarang yang menghadapi tantangan banjir, rob, dan penurunan muka tanah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan drainase, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan penataan ruang kota dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Renstra kedua dinas provinsi ini bukan hanya menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi kerangka pendukung yang penting bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, berkelanjutan, dan sesuai arah pembangunan Jawa Tengah.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Pekerjaan Umum dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Semarang, Bappeda berkewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum. Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi :
 1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, meliputi :
 - a) Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b) Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
 - c) Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
 - d) Mengembangkan kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
 - e) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
 - f) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
 2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan,

meliputi:

- a) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
 - b) mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
 - c) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - d) mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e) mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
 - f) mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan meningkatkan integrasi sistem antar moda.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum, meliputi:
- a) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b) mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - d) mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - f) meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
 - g) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h) mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang, meliputi :

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan lindung, meliputi :

- a) Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung, meliputi :
 - 1) mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
 - 2) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
 - 3) menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
- b) Pelestarian Kawasan cagar budaya, meliputi :
 - 1) meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
 - 2) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
- c) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota, meliputi :
 - 1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - 2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - 3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
 - 4) mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
 - 5) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan

- 6) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budaya, meliputi :
 - a) pengaturan pengembangan kawasan budaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, meliputi :
 - 1) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
 - 2) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
 - 3) membatasi pengembangan kawasan industri.
 - b) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, meliputi :
 - 1) mengembangkan kawasan budaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - 2) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif
 - c) pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai, meliputi :
 - 1) mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat;
 - 2) mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
 - 3) melakukan penghijauan kawasan pantai
- c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi:
 1. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
 - b) mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
 2. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
 - a) mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
 - b) mengatur pemanfaatan Kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
 - c) meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial Kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
 3. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
 - a) memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
 - b) mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
 - c) pengembangan kegiatan kepariwisataan.

- d. Rencana Struktur Ruang, meliputi :
1. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, meliputi :
 - a) rencana pembagian wilayah kota (BWK)

Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi:

 - 1) BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
 - 2) BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;
 - 3) BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
 - 4) BWK IV meliputi Kecamatan Genuk;
 - 5) BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;
 - 6) BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang;
 - 7) BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik;
 - 8) BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati;
 - 9) BWK IX meliputi Kecamatan Mijen; dan
 - 10) BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.

Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi:

 - 1) perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
 - 2) pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
 - 3) transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
 - 4) industri di BWK IV dan BWK X;
 - 5) pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
 - 6) perkantoran militer di BWK VII; dan
 - 7) kantor pelayanan publik di BWK IX.
 - b) Rencana penetapan pusat pelayanan.
 2. Rencana pengembangan sistem jaringan, meliputi :
 - a) rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b) rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - c) rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - e) rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
 - f) rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya
 - g) Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pendekatan berbasis data dan perencanaan terpadu. Dinas ini berfokus pada pengembangan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan pengelolaan ruang kota untuk mendukung aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan tata ruang wilayah. Melalui analisis tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum mengidentifikasi potensi pengembangan pusat pelayanan kegiatan, kawasan strategis, serta infrastruktur pendukung untuk memastikan konektivitas antarkawasan dan optimalisasi layanan publik.
 - h) Pemanfaatan teknologi menjadi prioritas dalam mendukung program kerja, seperti penggunaan sistem informasi berbasis GIS untuk memetakan kebutuhan infrastruktur strategis dan mitigasi risiko bencana seperti rob dan banjir. Inovasi pengelolaan kawasan pesisir juga menjadi fokus, termasuk pembangunan

tanggul pantai, sistem drainase terpadu, dan ruang terbuka hijau. Dinas Pekerjaan Umum turut berkontribusi dalam memperkuat aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan, jembatan, dan moda transportasi massal, termasuk pembangunan jalan lingkar dan terminal angkutan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional.

- i) Dalam bidang ekonomi dan sosial, Dinas Pekerjaan Umum berperan mendukung kawasan strategis yang memadukan pengembangan infrastruktur dengan aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa berbasis budaya serta edukasi. Dengan pendekatan ini, Dinas Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menjaga keseimbangan ekologi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan serta kenyamanan hidup masyarakat Kota Semarang secara berkelanjutan.
- j) Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, terdapat indikasi program yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut
:

Tabel 2.9.

Indikasi Program Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Rancangan persimpangan								
2	Peningkatan seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota							APBD	Dinas Bina Marga

Sumber : Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar arah pembangunan infrastruktur sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029, isu utama yang terkait langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah terkait “Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim”

Tabel 2.10.

Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	1. Penurunan Muka Tanah (<i>Land Subsidence</i>) yang Signifikan
	2. Meningkatnya Ancaman Banjir dan Rob
	3. Kerawanan Gerakan Tanah dan Longsor di Wilayah Dataran Tinggi
	4. Rendahnya Kapasitas Mitigasi Bencana Lingkungan
	5. Kerentanan Perubahan Iklim yang Tinggi di Sebagian Besar Wilayah Kecamatan

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telaahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Isu Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum	Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum	Target			Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Posisi strategis Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi. - Kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan. - Rekam jejak kerja sama nasional dan internasional di bidang infrastruktur. - Kapasitas inovasi melalui SILAPPU dan Pipa Resap Horizontal. - Dukungan sumber daya manusia perkotaan yang dinamis. - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. - Dukungan kebijakan pembangunan daerah sebagai kota cepat maju dan cepat tumbuh.	- Kurangnya dukungan teknologi modern dan terintegrasi - Keterbatasan kapasitas SDM untuk inovasi - Keterbatasan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap - Kurangnya pengawasan dan pengelolaan utilitas - Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas sistem drainase - Keterbatasan pengelolaan dan penyediaan sumber daya air - Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum - Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air dan ruang - Belum optimalnya penyelenggaraan fungsi kelembagaan	- Penurunan muka tanah (land subsidence). - Meningkatnya ancaman banjir dan rob. - Kerawanan gerakan tanah dan longsor di wilayah dataran tinggi. - Rendahnya kapasitas mitigasi bencana lingkungan. - Kerentanan perubahan iklim di sebagian besar wilayah kecamatan.	SDGs 6: Air bersih dan sanitasi layak. SDGs 9: Infrastruktur yang tangguh, industrialisasi inklusif, dan inovasi. SDGs 11: Kota dan permukiman berkelanjutan. SDGs 13: Penanganan perubahan iklim.	Prioritas 3 Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang tangguh bencana dan adaptif iklim. Penguatan sistem drainase, rumah pompa, dan kolam retensi. Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan perkotaan. Dukungan terhadap pengentasan kemiskinan, akses air bersih, dan sanitasi layak.	Mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan lestari. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi (banjir, rob, longsor). Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi. Penataan ruang berkelanjutan dan konservasi sumber daya air.	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air yang berkualitas dan tangguh bencana. Optimalisasi konektivitas melalui peningkatan kondisi jalan dan utilitas pendukung. Revitalisasi sistem drainase kota serta pembangunan rumah pompa dan kolam retensi. Pembangunan infrastruktur kota yang inklusif dan responsif gender. Penguatan inovasi, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Sumber: .. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pekerjaan umum. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
- Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya kawasan banjir dan rob	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga.		Persentase genangan, banjir, dan rob	%	5,85	5,67	5,49	5,31	5,13	4,95	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase	Persentase genangan air	%	2,92	2,83	2,74	2,65	2,56	2,47	
			Persentase kawasan banjir	%	1,88	1,8	1,72	1,64	1,56	1,48	
			Persentase kawasan rob	%	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	
			Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan		Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,91	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	
			Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	000	
		Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum	%	77,36	77,70	78,05	78,40	78,75	79,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum	%	82,68	84,03	85,39	86,74	88,12	89,45	

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Penguatan sistem data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum.	Peningkatan kualitas data spasial dan integrasi sistem informasi pembangunan daerah.	Penguatan pemanfaatan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi infrastruktur.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan transparansi informasi infrastruktur.	Terwujudnya sistem data infrastruktur yang terpadu dan terbuka.
Optimalisasi fungsi kelembagaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur.	Peningkatan kinerja kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan kolaborasi lintas sektor.	Penguatan peran kelembagaan dalam pengendalian banjir, rob, dan drainase kota.	Percepatan sinkronisasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	Konsolidasi fungsi kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pelayanan publik.
Penyusunan prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di	Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung	Penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas sesuai target	Tercapainya target pembangunan infrastruktur dasar dan

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
dasar dengan pendekatan berbasis data baseline.	kawasan prioritas sesuai hasil pemetaan kebutuhan.	konektivitas wilayah dan pengendalian banjir.	RPJMD dan rencana teknis.	strategis yang mendukung ketahanan banjir, konektivitas wilayah, dan kualitas hidup masyarakat.

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Menurunnya kawasan banjir dan rob	Penguatan sistem drainase kota dan peningkatan pengendalian banjir dan rob.	Meningkatkan kapasitas drainase, sarana pengendali banjir dan pompa, serta efektivitas operasi dan pemeliharaan berbasis data dan dokumen teknis yang selaras rencana tata ruang.	
	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik.	Memutakhirkan data kebinamargaan, mengoptimalkan pendanaan, dan meningkatkan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana pelengkap untuk mendukung konektivitas.	
		Penyediaan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan dan difabel	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan agar sarana pelengkap dan utilitas tetap berfungsi optimal.	
			Mengembangkan basis data terintegrasi, memanfaatkan aplikasi digital perencanaan dan keuangan, serta meningkatkan pengelolaan SDM, pengadaan, dan pemeliharaan aset.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Sasaran RPJMD yang relevan: Menurunnya kawasan banjir dan rob	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga				INDIKATOR TUJUAN: Persentase genangan, banjir, dan rob		
		Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase			INDIKATOR SASARAN: Persentase genangan air		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan banjir		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan rob		
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota		INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
					INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob		Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota	INDIKATOR KEGIATAN: luas kawasan rawan banjir terlindungi	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 03 02 2.01 0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatkan Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	1 03 02 2.01 0103 Peningkatan Tanggul Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 03 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Timur	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Timur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Barat	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Barat
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah I	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Tengah I
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah II	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pompa Tengah II

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN KEGIATAN : Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan		Bidang Rekayasa Teknis
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis sumber daya air.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis sumber daya air yang disusun	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air yang tersusun	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai		INDIKATOR PROGRAM: Persentase sungai yang dimanfaatkan		Bidang Pendayagunaan infrastruktur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Pemanfaatan sungai untuk fungsi lingkungan, konservasi, dan kegiatan masyarakat.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sungai yang direstorasi	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah pendayagunaan Sumber Daya Air	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi sistem drainase		INDIKATOR PROGRAM: Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bidang SDA dan Drainase
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	INDIKATOR KEGIATAN: Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase
				SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Drainase

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Drainase
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya sarana pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sarana pendukung, peralatan dan perbengkelan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik	1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material drainase yang tersedia	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbekalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bidang Rektek
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis sistem drainase perkotaan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan drainase.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Perancangan Teknis

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
	Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga				INDIKATOR TUJUAN: Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun		
		Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah			INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dalam kondisi mantap		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase jembatan dalam kondisi baik		
					INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dan jembatan yang terbangun		
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kondisi jalan		INDIKATOR PROGRAM: Persentase jalan dalam kondisi baik	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Bina Marga
				SASARAN KEGIATAN : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase jalan dan jembatan yang ditingkatkan kualitasnya dan dipelihara	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	
				SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material Bina marga	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material Bina Marga yang tersedia	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Perbekalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pengujian dan pemantauan panjang jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang diuji dan dipantau	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pengujian dan Laboratorium (Nginduk di Bidang BM)
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah I	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				wilayah I			Drainase Wilayah I
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah II	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah II	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah III	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah III	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
				SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah IV	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah IV	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kasubag TU - UPTD
			SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan		INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Rekayasa Teknis
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis survei dan pengukuran	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis survei dan pengukuran yang tersusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Survei dan Pengukuran
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terkelolanya Leger Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan yang disusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoor Perancangan Teknis
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersusun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoor Pengembangan Teknologi Infrastruktur
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara		INDIKATOR PROGRAM: Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
				SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ruang milik jalan yang dipelihara	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pendayagunaan Ruang Milik Jalan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan yang Dipelihara	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	
		Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum			INDIKATOR SASARAN: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum		
					INDIKATOR SASARAN: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum		INDIKATOR PROGRAM: Persentase perencanaan serta, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT
			SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum		INDIKATOR PROGRAM: Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum		
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.03.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi	1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					pelaksanaan tugas ASN		
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan.	1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Nilai layanan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan rumah tangga	1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Logistik Kantor		Kantor	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket mebel yang disediakan	1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				SASARAN KEGIATAN : Terpenuhi kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum yang selesai ditindaklanjuti	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
				SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah mebel yang dipelihara	1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah gedung kantor dan	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipeliharaaan/ rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya pelayanan internal yg berkualitas dalam mendukung kinerja dinas pekerjaan umum		INDIKATOR PROGRAM : Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
				SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subkoordinator Penyiapan Lahan
				SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	1.03.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan dan Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	• Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin • Normalisasi Sungai Plumbon • Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin • Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu • Normalisasi Sungai Babon • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen • Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor • Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor	Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	• Peningkatan pemeliharaan saluran drainase • Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin • Normalisasi Sungai Plumbon • Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin • Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu • Normalisasi Sungai Babon • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen • Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo • Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor • Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) • Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor	Meningkatnya kondisi sistem drainase	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	• Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa	Meningkatnya stasiun pompa dalam kondisi baik	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	• Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan • Rintisan pembangunan Jalan Srandol – Sekaran • Pembangunan Semarang Middle	Meningkatnya kondisi jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Ring Road • Pengembangan Semarang Outer Ring Road			

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				387.517.6 62.431		429.052.33 3.082		447.130.1 55.055		449.237.66 4.645		458.283.493.8 26	
	INDIKATOR TUJUAN: Persentase genangan, banjir, dan rob		5,67		5,49		5,31		5,13		4,95		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase genangan air	NA	2,83		2,74		2,65		2,56		2,47		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan banjir	2,23	1,8		1,72		1,64		1,56		1,48		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase kawasan rob	1,06	1,04		1,03		1,02		1,01		1,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				51.995.45 5.166		57.496.346 .844		59.890.59 0.951		60.330.379 .572		61.367.749.85 1	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir		98,20%	48.795.45 5.166	98,28%	52.796.346 .844	98,36%	55.690.59 0.951	98,44%	57.130.379 .572	98,52%	48.167.749.85 1	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
	INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob		98,96%		98,97%		98,98%		98,99%		99,00%		Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.995.45 5.166		24.500.000 .000		28.500.00 0.000		32.130.379 .572		23.167.749.85 1	
SASARAN KEGIATAN : Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota	INDIKATOR KEGIATAN: luas kawasan rawan banjir terlindungi	87,37 %	100%	21.995.45 5.166	100%	24.500.000 .000	100%	28.500.00 0.000	100%	32.130.379 .572	100%	23.167.749.85 1	Subkoordinato r Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1 03 02 2.01 0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				500.000.0 00		500.000.00 0		-		-		-	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun		2 Unit	500.000.0 00	2 Unit	500.000.00 0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.000.000. 000		2.000.000. 000		2.000.000. 000		2.000.000. 000		2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	94,20 %	10 Unit	2.000.000. 000	10 Unit	2.000.000. 000	10 Unit	2.000.000. 000	10 Unit	2.000.000. 000	10 Unit	2.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				15.000.00 0.000		17.500.000 .000		22.000.00 0.000		25.000.000 .000		9.667.749.851	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	90,62 %	1 Unit	15.000.00 0.000	1 Unit	17.500.000 .000	1 Unit	22.000.00 0.000	1 Unit	25.000.000 .000	1 Unit	9.667.749.851	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	99,33 %	3 Unit	1.500.000. 000	3 Unit	1.500.000. 000	3 Unit	1.500.000. 000	3 Unit	1.500.000. 000	3 Unit	1.500.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	94,63 %	2 Unit	1.000.000. 000	2 Unit	1.000.000. 000	2 Unit	1.000.000. 000	2 Unit	1.000.000. 000	2 Unit	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0103 Peningkatan Tanggul Sungai				-		-		-		-	0.25	7.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan		0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0.25	7.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai				1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.630.379. 572		1.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Tanggul Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi		1 Km	1.000.000. 000	1 Km	1.000.000. 000	1 Km	1.000.000. 000	1,5 Km	1.630.379. 572	1 Km	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1 03 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				995.455.1 66		1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		2 Km	995.455.1 66	2 Km	1.000.000. 000	2 Km	1.000.000. 000	2 Km	1.000.000. 000	2 Km	1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				4.500.000. 000		4.000.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Timur	82,06	100%	4.500.000. 000	100%	4.000.000. 000	100%	4.250.000. 000	100%	4.250.000. 000	100%	4.250.000.000	UPTD Pompa Timur
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				4.500.000. 000		4.000.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		19	4.500.000. 000	19	4.000.000. 000	19	4.250.000. 000	19	4.250.000. 000	19	4.250.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.500.000. 000		3.796.346. 844		4.250.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Barat		100%	4.500.000. 000	100%	3.796.346. 844	100%	4.250.000. 000	100%	4.250.000. 000	100%	4.250.000.000	UPTD Pompa Barat
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				4.500.000. 000		3.796.346. 844		4.250.000. 000		4.250.000. 000		4.250.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		4	4.500.000. 000	4	3.796.346. 844	4	4.250.000. 000	4	4.250.000. 000	4	4.250.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah I		100%	5.500.000. 000	100%	5.500.000. 000	100%	5.500.000. 000	100%	5.500.000. 000	100%	5.500.000.000	UPTD Pompa Tengah I
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000. 000		5.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		5	5.500.000. 000	5	5.500.000. 000	5	5.500.000. 000	5	5.500.000. 000	5	5.500.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.500.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah II		100%	8.500.000. 000	100%	8.000.000. 000	100%	8.000.000. 000	100%	8.000.000. 000	100%	8.000.000.000	UPTD Pompa Tengah II
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				8.500.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000. 000		8.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		24	8.500.000. 000	24	8.000.000. 000	24	8.000.000. 000	24	8.000.000. 000	24	8.000.000.000	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.800.000. 000		7.000.000. 000		5.190.590. 951		3.000.000. 000		3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	92,09	100%	3.800.000. 000	100%	7.000.000. 000	100%	5.190.590. 951	100%	3.000.000. 000	100%	3.000.000.000	Subkoor Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				-		2.500.000. 000		1.500.000. 000		-		-	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0 KM	-	2 KM	2.500.000. 000	2 KM	1.500.000. 000	0 KM	-	0 KM	-	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.800.000. 000		4.500.000. 000		3.690.590. 951		3.000.000. 000		3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	92,06 %	11 KM	3.800.000. 000	11 KM	4.500.000. 000	11 KM	3.690.590. 951	11 KM	3.000.000. 000	11 KM	3.000.000.000	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Air
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan		100%	1.200.000. 000	100%	1.200.000. 000	100%	1.200.000. 000	100%	1.200.000. 000	100%	1.200.000.000	Bidang Rekayasa Teknis
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis sumber daya air.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis sumber daya air yang disusun		100%	800.000.0 00	100%	800.000.00 0	100%	800.000.0 00	100%	800.000.00 0	100%	800.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	96,65	8 Dokume n	800.000.0 00	8 Dokume n	800.000.00 0	8 Dokumen	800.000.0 00	8 Dokume n	800.000.00 0	8 Dokumen	800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.0 00	100 %	200.000.00 0	100 %	200.000.0 00	100 %	200.000.00 0	100 %	200.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		100 %	200.000.0 00	100 %	200.000.00 0	100 %	200.000.0 00	100 %	200.000.00 0	100 %	200.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		2 Dokume n	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.00 0	2 Dokumen	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.00 0	2 Dokumen	200.000.000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembanga n teknologi infrastruktur Sumber Daya Air yang tersusun		100%	200.000.0 00	100%	200.000.00 0	100%	200.000.0 00	100%	200.000.00 0	100%	200.000.000	Subkoor Pengembanga n Teknologi Infrastruktur

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	INDIKATOR PROGRAM: Persentase sungai yang termanfaatkan		100%	2.000.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	12.000.000.000	Bidang Pendayagunaan infrastruktur

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000. 000		3.500.000. 000		3.000.000. 000		2.000.000. 000		12.000.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN : Pemanfaatan sungai untuk fungsi lingkungan, konservasi, dan kegiatan masyarakat.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sungai yang direstorasi		100%	2.000.000. 000	100%	3.500.000. 000	100%	3.000.000. 000	100%	2.000.000. 000	100%	12.000.000.00 0	Subkoordinato r Pendayagunaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				-		-		-		-		10.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	88,08	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	10.000.000.00 0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai				2.000.000. 000		3.500.000. 000		3.000.000. 000		2.000.000. 000		2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah pendayaguna an Sumber Daya Air	92,58	1 KM	2.000.000. 000	1 KM	3.500.000. 000	1 KM	3.000.000. 000	1 KM	2.000.000. 000	1 KM	2.000.000.000	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				122.956.7 54.320		135.965.04 0.994		141.626.8 52.848		142.666.84 7.233		145.119.978.6 11	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi sistem drainase	INDIKATOR PROGRAM: Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	60,57	61,77	120.056.7 54.320	62,37	133.765.04 0.994	62,97	138.226.8 52.848	63,57	140.666.84 7.233	64,17	143.119.978.6 11	Bidang SDA dan Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				68.000.00 0.000		80.500.000 .000		85.000.00 0.000		89.000.000 .000		90.000.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	INDIKATOR KEGIATAN: Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/ Kota		61,77%	68.000.00 0.000	62,37%	80.500.000 .000	62,97%	85.000.00 0.000	63,57%	89.000.000 .000	64,17%	90.000.000.00 0	Subkoordinato r Operasi dan Pemeliharaan Drainase
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				38.000.00 0.000		55.500.000 .000		40.000.00 0.000		44.000.000 .000		50.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang	76,09 %	4 Sistem	38.000.00 0.000	4 Sistem	55.500.000 .000	4 Sistem	40.000.00 0.000	4 Sistem	44.000.000 .000	4 Sistem	50.000.000.00 0	Operasi dan Pemeliharaan Drainase

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Ditingkatkan												
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				30.000.00 0.000		25.000.000 .000		45.000.00 0.000		45.000.000 .000		40.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara		4 Sistem	30.000.00 0.000	4 Sistem	25.000.000 .000	4 Sistem	45.000.00 0.000	4 Sistem	45.000.000 .000	4 Sistem	40.000.000.00 0	Operasi dan Pemeliharaan Drainase
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.00 0.000		20.000.000 .000		14.500.00 0.000		11.000.000 .000		11.000.000.00 0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGAITAN: Tersedianya sarana pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase sarana pendukung, peralatan dan perbengkelan untuk pengelolaan dan pengembang an sistem drainase		100%	15.000.00 0.000	100%	20.000.000 .000	100%	14.500.00 0.000	100%	11.000.000 .000	100%	11.000.000.00 0	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan													
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik		60 Unit	15.000.00 0.000	60 Unit	20.000.000 .000	60 Unit	14.500.00 0.000	60 Unit	11.000.000 .000	60 Unit	11.000.000.00 0	
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				37.056.75 4.320		33.265.040 .994		38.726.85 2.848		40.666.847 .233		42.119.978.61 1	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material drainase	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material drainase yang tersedia		100%	37.056.75 4.320	100%	33.265.040 .994	100%	38.726.85 2.848	100%	40.666.847 .233	100%	42.119.978.61 1	UPTD Perbekalan
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah saluran drainase yang terpelihara		4 Sistem	37.056.75 4.320	4 Sistem	33.265.040 .994	4 Sistem	38.726.85 2.848	4 Sistem	40.666.847 .233	4 Sistem	42.119.978.61 1	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.900.000. 000		2.200.000. 000		3.400.000. 000		2.000.000. 000		2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan		100%	2.900.000. 000	100%	2.200.000. 000	100%	3.400.000. 000	100%	2.000.000. 000	100%	2.000.000.000	Bidang Rektek
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.900.000. 000	100%	2.200.000. 000	100%	3.400.000. 000	100%	2.000.000. 000	100%	2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis sistem drainase perkotaan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan drainase.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang disusun		100%	2.900.000. 000	100%	2.200.000. 000	100%	3.400.000. 000	100%	2.000.000. 000	100%	2.000.000.000	Subkoordinato r Perancangan Teknis
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				2.900.000. 000	11 Dokume n	2.200.000. 000	15 Dokumen	3.400.000. 000	10 Dokume n	2.000.000. 000	10 Dokumen	2.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	94,70 %	14 Dokume n	2.900.000. 000	11 Dokume n	2.200.000. 000	15 Dokumen	3.400.000. 000	10 Dokume n	2.000.000. 000	10 Dokumen	2.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	INDIKATOR TUJUAN: Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dalam kondisi mantap	93,27	94,20		94,40		94,60		94,80		95,00		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,90	92,01		92,11		92,21		92,31		92,41		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				141.363.7 04.631		156.319.36 6.117		162.828.7 66.134		164.024.45 0.421		166.844.822.0 34	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi jalan	INDIKATOR PROGRAM: Persentase jalan dalam kondisi baik	50,34	50,94	141.363.7 04.631	51,24	156.319.36 6.117	51,54	162.828.7 66.134	51,84	150.924.45 0.421	54,24	166.844.822.0 34	Bidang Bina Marga
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				29.500.00 0.000		40.800.000 .000		60.500.00 0.000		61.000.000 .000		54.000.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	93,08 %	100%	29.500.00 0.000	100%	40.800.000 .000	100%	60.500.00 0.000	100%	61.000.000 .000	100%	54.000.000.00 0	Subkoordinato r Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan				-		-		34.000.00 0.000		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	87,87	0 KM	-	0 KM	-	1,5 KM	34.000.00 0.000	0 KM	-	0 KM	-	
1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan				17.000.00 0.000				-		30.000.000 .000		37.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang jembatan yang dibangun	70,14	15 M	17.000.00 0.000	0 M		0 M	-	24 M	30.000.000 .000	28 M	37.000.000.00 0	
1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan				12.500.00 0.000		20.800.000 .000		26.500.00 0.000		11.000.000 .000		4.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Direhabilitasi	83,89	3 KM	12.500.00 0.000	5 KM	20.800.000 .000	6,5 KM	26.500.00 0.000	2,7 KM	11.000.000 .000	0,9 KM	4.000.000.000	
1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan				-		20.000.000 .000		-		20.000.000 .000		13.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	71,26	0 M	-	25 M	20.000.000 .000	0 M	-	25 M	20.000.000 .000	12 M	13.000.000.00 0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				52.500.00 0.000		52.000.000 .000		46.500.00 0.000		46.500.000 .000		56.500.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase jalan dan jembatan yang ditingkatkan kualitasnya dan dipelihara			52.500.00 0.000	-	52.000.000 .000	-	46.500.00 0.000	-	46.500.000 .000	0	56.500.000.00 0	Subkoordinato r Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan				51.000.00 0.000		50.500.000 .000		45.000.00 0.000		45.000.000 .000		55.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	99,2	16 KM	51.000.00 0.000	16 KM	50.500.000 .000	14 KM	45.000.00 0.000	14 KM	45.000.000 .000	17,5 KM	55.000.000.00 0	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	86,21	20 Jembata n	1.500.000. 000	20 Jembata n	1.500.000. 000	20 Jembatan	1.500.000. 000	20 Jembata n	1.500.000. 000	20 Jembatan	1.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				17.000.00 0.000		22.000.000 .000		17.000.00 0.000		17.000.000 .000		17.000.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan			17.000.00 0.000		22.000.000 .000		17.000.00 0.000		17.000.000 .000		17.000.000.00 0	Subkoordinato r Pengelolaan Utilitas dan Bangunan Pelengkap
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				17.000.00 0.000		22.000.000 .000		17.000.00 0.000		17.000.000 .000		17.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360,72	360 KM	17.000.00 0.000	476 KM	22.000.000 .000	360 KM	17.000.00 0.000	360 KM	17.000.000 .000	360 KM	17.000.000.00 0	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				10.163.70 4.631		10.119.366 .117		9.628.766. 134		10.824.450 .421		10.644.822.03 4	
SASARAN KEGIATAN: Tersedianya material Bina marga	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase material Bina Marga yang tersedia		100%	10.163.70 4.631	100%	10.119.366 .117	100%	9.628.766. 134	100%	10.824.450 .421	100%	10.644.822.03 4	UPTD Perbekalan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan				10.163.70 4.631		10.119.366 .117		9.628.766. 134		10.824.450 .421		10.644.822.03 4	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		16 KM	10.163.70 4.631	16 KM	10.119.366 .117	14 KM	9.628.766. 134	14 KM	10.824.450 .421	17,5 KM	10.644.822.03 4	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.100.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pengujian dan pemantauan panjang jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang diuji dan dipantau	NA	100%	2.100.000. 000	100%	1.600.000. 000	100%	1.600.000. 000	100%	1.600.000. 000	100%	1.600.000.000	UPTD Pengujian dan Laboratorium (Nginduk di Bidang BM)
1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.100.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000. 000		1.600.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	73,9	21 KM	2.100.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	16 KM	1.600.000.000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah I	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah I			3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	74 KM	3.250.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah II	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah II			3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000. 000		3.500.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		48 KM	3.500.000. 000	48 KM	3.500.000. 000	48 KM	3.500.000. 000	48 KM	3.500.000. 000	48 KM	3.500.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah III	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah III			4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000.000	UPTD Pemeilharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000. 000		4.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		78 KM	4.000.000. 000	78 KM	4.000.000. 000	78 KM	4.000.000. 000	78 KM	4.000.000. 000	78 KM	4.000.000.000	Kasubag TU - UPTD

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000.000	
SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah IV	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah IV			3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan				3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000. 000		3.250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		112 KM	3.250.000. 000	112 KM	3.250.000. 000	112 KM	3.250.000. 000	112 KM	3.250.000. 000	112 KM	3.250.000.000	Kasubag TU - UPTD
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
SASARAN PROGRAM: Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	INDIKATOR PROGRAM: Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan			4.100.000. 000		3.800.000. 000		3.600.000. 000		3.100.000. 000		3.100.000.000	Bidang Rekayasa Teknis

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				1.100.000. 000		1.100.000. 000		1.100.000. 000		1.100.000. 000		1.100.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis survei dan pengukuran	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis survei dan pengukuran yang tersusun		100%	1.100.000. 000	100%	1.100.000. 000	100%	1.100.000. 000	100%	1.100.000. 000	100%	1.100.000.000	Subkoordinato r Survei dan Pengukuran
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan				300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terkelolanya Leger Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	94,99	1 Dokume n	300.000.0 00	1 Dokume n	300.000.00 0	1 Dokumen	300.000.0 00	1 Dokume n	300.000.00 0	1 Dokumen	300.000.000	
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan				800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.0 00		800.000.00 0		800.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Jalan/Jembat an yang Disurvey Kondisinya	96,91	839 KM	800.000.0 00	839 KM	800.000.00 0	839 KM	800.000.0 00	839 KM	800.000.00 0	839 KM	800.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.700.000. 000		2.400.000. 000		2.200.000. 000		1.700.000. 000		1.700.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan yang disusun		100%	2.700.000. 000	100%	2.400.000. 000	100%	2.200.000. 000	100%	1.700.000. 000	100%	1.700.000.000	Subkoor Perancangan Teknis
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.700.000. 000		2.400.000. 000		2.200.000. 000		1.700.000. 000		1.700.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	97,88	12 Dokume n	2.700.000. 000	12 Dokume n	2.400.000. 000	10 Dokumen	2.200.000. 000	10 Dokume n	1.700.000. 000	10 Dokumen	1.700.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Penyelenggara an Jalan dan Jembatan yang Disusun												
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.000	
SASARAN KEGIATAN : Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase dokumen teknis pengembanga n teknologi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersusun		100%	300.000.0 00	100%	300.000.00 0	100%	300.000.0 00	100%	300.000.00 0	100%	300.000.000	Subkoor Pengembanga n Teknologi Infrastruktur
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan yang Disusun	97,88	3 dokume n	300.000.0 00	3 dokume n	300.000.00 0	3 dokumen	300.000.0 00	3 dokume n	300.000.00 0	3 dokumen	300.000.000	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	INDIKATOR PROGRAM: Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara			12.000.00 0.000		12.000.000 .000		10.000.00 0.000		10.000.000 .000		10.000.000.00 0	Bidang Pendayagunaa n Infrastruktur
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				12.000.00 0.000		12.000.000 .000		10.000.00 0.000		10.000.000 .000		10.000.000.00 0	
SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ruang milik jalan yang dipelihara	56,59 %	59,69%	12.000.00 0.000	61,24%	12.000.000 .000	62,79%	10.000.00 0.000	64,34%	10.000.000 .000	65,89%	10.000.000.00 0	Subkoordinato r Pendayagunaa n Ruang Milik Jalan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan				12.000.00 0.000		12.000.000 .000		10.000.00 0.000		10.000.000 .000		10.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Panjang Pendayaguna an Ruang Milik Jalan yang Dipelihara	96,73 %	15,3 KM	12.000.00 0.000	15,3 KM	12.000.000 .000	15,3 KM	10.000.00 0.000	15,3 KM	10.000.000 .000	15,3 KM	10.000.000.00 0	
	INDIKATOR SASARAN: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum	77,35	77,70		78,05		78,40		78,75		79,10		
	INDIKATOR SASARAN: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum	81,33	84,03		85,39		86,74		88,12		89,45		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				71.201.74 8.314		79.271.579 .127		82.783.94 5.122		82.215.987 .419		84.950.943.33 0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR PROGRAM: Persentase perencanaan serta, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas		100%	71.201.74 8.314	100%	73.891.660 .488	100%	76.972.35 3.410	100%	78.577.077 .077	100%	81.312.032.98 8	SEKRETARIAT
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR PROGRAM: Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum		100%	-	100%		100%		100%		100%		
1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.00 0		90.000.000		90.000.00 0		90.000.000		90.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	81,21 %	100%	90.000.00 0	100%	90.000.000	100%	90.000.00 0	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Subkoordinato r Perencanaan dan Evaluasi
1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	98,04 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	41,75 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	60,23 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70,32 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.00 0		10.000.000		10.000.00 0		10.000.000		10.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	88,95 %	1 Laporan	10.000.00 0	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.00 0	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
1.03.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.00 0		50.000.000		50.000.00 0		50.000.000		50.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan												Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	66,33 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.284.09 2.122	100%	49.646.660 .488	100%	52.127.35 3.410	100%	54.732.077 .077	100%	57.467.032.98 8	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	96,79 %	100%	47.284.09 2.122	100%	49.646.660 .488	100%	52.127.35 3.410	100%	54.732.077 .077	100%	57.467.032.98 8	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47.259.09 2.122		49.621.660 .488		52.102.35 3.410		54.707.077 .077		57.442.032.98 8	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	97,47 %	400 Orang/ bulan	47.259.09 2.122	400 Orang/ bulan	49.621.660 .488	400 Orang/bul an	52.102.35 3.410	400 Orang/b ulan	54.707.077 .077	400 Orang/bula n	57.442.032.98 8	
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10.000.00 0		10.000.000		10.000.00 0		10.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	73,65 %	1 Dokume n	10.000.00 0	1 Dokume n	10.000.000	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokume n	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	98,67 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emest eran SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	98,46 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	97,43 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan.	98,77 %	100%	10.000.00 0	100%	10.000.000	100%	10.000.00 0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	99,48 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penatausaha an barang milik daerah pada SKPD	97,72 %	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Nilai layanan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	51,04 %	100%	115.000.0 00	100%	15.000.000	100%	15.000.00 0	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	58,72 %	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	43,35 %	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000									

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		50 orang	100.000.0 00									
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum	86,34 %	100%	2.507.656. 192	100%	2.635.000. 000	100%	2.635.000. 000	100%	2.635.000. 000	100%	2.635.000.000	Subbagian Umum dan Kepengawain

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.0 00		200.000.00 0		200.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	98,05 %	1 Paket	200.000.0 00	1 Paket	200.000.00 0	1 Paket	200.000.0 00	1 Paket	200.000.00 0	1 Paket	200.000.000	
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				602.656.1 92		730.000.00 0		730.000.0 00		730.000.00 0		730.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	91,89 %	4 Paket	602.656.1 92	4 Paket	730.000.00 0	4 Paket	730.000.0 00	4 Paket	730.000.00 0	4 Paket	730.000.000	
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.0 00		100.000.00 0		100.000.0 00		100.000.00 0		100.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket peralatan rumah tangga	86,42 %	1 Paket	100.000.0 00	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.0 00	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.00 0		50.000.000		50.000.00 0		50.000.000		50.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.00 0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.00 0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	74,77 %	1 Paket	300.000.0 00	1 Paket	300.000.00 0	1 Paket	300.000.0 00	1 Paket	300.000.00 0	1 Paket	300.000.000	
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	99,25 %	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu				250.000.0 00		250.000.00 0		250.000.0 00		250.000.00 0		250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	90,04 %	1 Laporan	250.000.0 00	1 Laporan	250.000.00 0	1 Laporan	250.000.0 00	1 Laporan	250.000.00 0	1 Laporan	250.000.000	
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.0 00		700.000.00 0		700.000.0 00		700.000.00 0		700.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	59,53 %	1 Laporan	700.000.0 00	1 Laporan	700.000.00 0	1 Laporan	700.000.0 00	1 Laporan	700.000.00 0	1 Laporan	700.000.000	
1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				300.000.0 00		250.000.00 0		300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	89,58 %	1 Dokume n	300.000.0 00	1 Dokume n	250.000.00 0	1 Dokumen	300.000.0 00	1 Dokume n	300.000.00 0	1 Dokumen	300.000.000	
1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000							
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah Dokumen Penatausaha n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokume n	50.000.000							
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.0 00		400.000.00 0		1.000.000. 000		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	87,06 %	100%	100.000.0 00	100%	400.000.00 0	100%	1.000.000. 000	100%	-	100%	-	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.00 0							
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1	300.000.00 0							
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				100.000.0 00									
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah paket mebel yang disediakan	73,33 %	20 unit	100.000.0 00	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.00 0							

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4	100.000.00 0							
1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1.000.000. 000					
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	92,80 %	0 Unit		0 Unit		1 Unit	1.000.000. 000	0 Unit		0 Unit		
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum yang selesai ditindaklanjuti	89,18 %	100%	16.020.00 0.000	100%	17.020.000 .000	100%	17.020.00 0.000	100%	17.020.000 .000	100%	17.020.000.00 0	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.00 0		20.000.000		20.000.00 0		20.000.000		20.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	96,13 %	1 Laporan	20.000.00 0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.00 0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000. 000		7.000.000. 000		7.000.000. 000		7.000.000. 000		7.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90,75 %	1 Laporan	7.000.000. 000	1 Laporan	7.000.000. 000	1 Laporan	7.000.000. 000	1 Laporan	7.000.000. 000	1 Laporan	7.000.000.000	
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.000.000. 000		10.000.000 .000		10.000.00 0.000		10.000.000 .000		10.000.000.00 0	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	87,34 %	1 Laporan	9.000.000. 000	1 Laporan	10.000.000 .000	1 Laporan	10.000.00 0.000	1 Laporan	10.000.000 .000	1 Laporan	10.000.000.00 0	
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.075.000. 000		4.075.000. 000		4.075.000. 000		4.075.000. 000		4.075.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan	61,55 %	100%	4.075.000. 000	100%	4.075.000. 000	100%	4.075.000. 000	100%	4.075.000. 000	100%	4.075.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000. 000		3.000.000. 000		3.000.000. 000		3.000.000. 000		3.000.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	66,03 %	75 Unit	3.000.000. 000	75 Unit	3.000.000. 000	75 Unit	3.000.000. 000	75 Unit	3.000.000. 000	75 Unit	3.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				75.000.00 0		75.000.000		75.000.00 0		75.000.000		75.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah mebel yang dipelihara	99,57 %	200 Unit	75.000.00 0	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.00 0	200 Unit	75.000.000	200 Unit	75.000.000	
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.0 00		250.000.00 0		250.000.0 00		250.000.00 0		250.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	93,39 %	350 Unit	250.000.0 00	350 Unit	250.000.00 0	350 Unit	250.000.0 00	350 Unit	250.000.00 0	350 Unit	250.000.000	
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.0 00		750.000.00 0		750.000.0 00		750.000.00 0		750.000.000	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/ rehabilitasi	95,62 %	2 Unit	750.000.0 00	2 Unit	750.000.00 0	2 Unit	750.000.0 00	2 Unit	750.000.00 0	2 Unit	750.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
Terwujudnya pelayanan internal yg berkualitas dalam mendukung kinerja dinas pekerjaan umum	INDIKATOR PROGRAM : Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan		100%	1.000.000.000	100%	5.811.591.712	100%	4.852.039.769	100%	3.638.910.342	100%	3.638.910.342	Bidang Pendayagunaan Infrastruktur
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000.000.000		5.811.591.712		4.852.039.769		3.638.910.342		3.638.910.342	
SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	INDIKATOR KEGIATAN: Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur		100%	1.000.000.000	100%	5.811.591.712	100%	4.852.039.769	100%	3.638.910.342	100%	3.638.910.342	Subkoor Penyiapan Lahan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	BASEL INE 2024	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KETERANGAN
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				1.000.000.000		5.811.591.712		4.852.039.769		3.638.910.342		3.638.910.342	
SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	INDIKATOR SUB KEGIATAN: Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan / rehabilitasi	60,27 %	0,01	1.000.000.000	0,058	5.811.591.712	0,048	4.852.039.769	0,036	3.638.910.342	0,036	3.638.910.342	

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase genangan, banjir, dan rob	%	5,85	5,67	5,49	5,31	5,13	4,95	
1	Persentase genangan air	%	2,92	2,83	2,74	2,65	2,56	2,47	
2	Persentase kawasan banjir	%	1,88	1,8	1,72	1,64	1,56	1,48	
3	Persentase kawasan rob	%	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	
	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,91	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	
6	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	000	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,5	95,21	95,93	96,64	97,35	98,06
3	Persentase luas sawah beririgasi	%	71,04	76,65	82,25	87,86	93,47	99,08
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,62	54,84	55,06	55,27	55,49	55,71

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Permasalahan genangan, banjir dan rob serta infrastruktur binamarga sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan infrastruktur secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Semarang, **8 Agustus** 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang

